

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESADARAN MENGENAI KESEHATAN REPRODUKSI DI KECAMATAN TELUK KABUNG KOTA PADANG

Fachrina, Yulkardi, Zeni Eka Putri, Sri Meiyenti

FISIP Universitas Andalas

fachrina_tanjung@yahoo.com

ABSTRAK

Perempuan lebih rentan dan berisiko dalam kesehatan reproduksinya, yaitu saat mengalami kehamilan, melahirkan, aborsi atau persalinan yang tidak aman, pemakaian alat kontrasepsi, penyakit infeksi seksual menular, dan HIV/AIDS. Akan tetapi pada kenyataannya pengetahuan dan pemahaman, serta partisipasi laki-laki dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan belum memadai. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB dan kehidupan seksual yang rendah, berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi belum menyentuh sebagian besar penduduk. Tidak terkecuali dengan perempuan pada keluarga nelayan, yang mayoritas hidup dalam lingkaran kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya perempuan mendapatkan informasi yang lengkap, benar dan akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Masalah dipecahkan dengan menggunakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut; 1) Memberikan pengetahuan kepada perempuan nelayan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi; 2) Memberikan pemahaman kepada perempuan nelayan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak reproduksi perempuan; 3) Memberikan pendampingan dalam rangka memperbaiki perilaku perempuan dalam keluarga nelayan dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapinya berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi; 4) Mendorong perempuan dalam keluarga nelayan menjadi perempuan yang berdaya dan bertanggungjawab atas kesehatan reproduksinya sendiri. Berdasarkan kerangka pemecahan masalah seperti yang dijelaskan diatas maka metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah/penyuluhan dan FGD (Focus Group Discussion).

Kata kunci: Perempuan Nelayan, Kesehatan Reproduksi

ABSTRACT

Women are more vulnerable and at risk of reproductive health, namely when experiencing pregnancy, childbirth, unsafe abortion or childbirth, use of contraceptives, sexually transmitted infections, and HIV / AIDS. However, in reality the knowledge and understanding, as well as men's participation in the fulfillment and protection of women's reproductive rights, are not yet adequate. Knowledge of reproductive health, family planning and low sexual life related to reproductive health services has not touched a large part of the population. There is no exception for women in fishing families, the majority of whom live in a circle of poverty. In this regard, women should have complete, correct and accurate information on matters relating to their reproductive health. Problems are solved by using the problem solving framework as follows: 1) Providing knowledge to women fishermen regarding sexual and reproductive health; 2) Providing understanding to fishing women to increase awareness about women's reproductive rights; 3) Providing assistance in order to improve the behavior of women in the fishermen's family in addressing the problems they face in relation to sexual and reproductive health; 4) Encouraging women in the family of fishermen to become

women who are empowered and responsible for their own reproductive health. Based on the problem solving framework as described above, the method of implementing activities is carried out through lectures / counseling and FGD (Focus Group Discussion).

Keywords: Fishermen Women, Reproductive Health

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi adalah bagian dari kesehatan secara umum yang merupakan hak asasi setiap orang. Kesehatan reproduksi berhubungan dengan hak reproduksi untuk membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan atau kekerasan (Adriana, 1998). Hak reproduksi salah satunya mencakup hak kesehatan seksual dan reproduksi, yang mana setiap orang tidak hanya mempunyai kesehatan secara fisik yang berkaitan dengan organ reproduksi melainkan juga menyangkut kondisi sosial di sekitarnya yang memungkinkan terciptanya kesehatan seksual dan reproduksi yang baik. Dengan demikian kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum menikah dan sesudah menikah (Mohamad, dalam Jurnal Perempuan No 53 Th 2007).

Kesehatan reproduksi bukan menjadi masalah seseorang saja, tetapi juga menjadi kepedulian keluarga dan masyarakat. Kesehatan reproduksi menjadi masalah cukup serius sepanjang hidup terutama bagi perempuan, selain karena perempuan sangat rentan terhadap resiko-resiko kesehatan tertentu, kurangnya layanan-layanan kesehatan dan respon yang tidak memadai terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksinya, juga berhubungan dengan kehidupan sosialnya, seperti kurangnya pendidikan, kawin muda, kematian ibu, masalah kesehatan reproduksi perempuan, masalah kesehatan kerja, menopause, dan masalah gizi (Baso dan Raharjo, 1999).

Meskipun secara umum semua negara sudah mengakui hak dan kesehatan reproduksi semua pasangan dan individu seperti terlihat pada Konferensi PBB melalui UNFPA di Kairo 1994 yang melahirkan pengakuan terhadap hak reproduksi semua manusia, dimana semua negara yang tergabung dalam konferensi ini menyepakati pendeklarasian pelayanan terhadap kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari hak reproduksi semua pasangan dan individu. Akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kesehatan reproduksi tersebut yang berlangsung pada ruang privat (keluarga) yang sulit terdeteksi. Di banyak negara, sekitar 350.000 wanita setiap menitnya tewas akibat penanganan hal-hal yang berhubungan dengan reproduksinya, 6 dari 10 wanita mengidap penyakit seksual menular yang mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan, rentan terhadap kanker dan

problem kesehatan lainnya, sehingga hampir 600 juta wanita tiap tahunnya mengidap penyakit berat, sedangkan lakilaki hanya berjumlah 320 juta orang (www.or.id/jurnal/2003/15).

Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan bayi di Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN merupakan salah satu indikator belum terpenuhinya hak kesehatan reproduksi perempuan. Hak setiap perempuan Indonesia, khususnya hak setiap perempuan untuk menjalani kehamilan dan melahirkan untuk dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang tersedia masih dilanggar (Sadli dalam Jurnal Perempuan No. 53, 2007). Demikian juga dengan tindakan aborsi tidak aman yang terjadi pada perempuan ketika tidak menghendaki kehamilan, merupakan pelanggaran terhadap hak reproduksi mereka. Penelitian Adriana (1998) mengungkapkan bahwa pada umumnya perempuan pernah mengalami pelanggaran terhadap hak reproduksi tapi ironisnya mereka tidak menyadari adanya pelanggaran tersebut, karena dikonstruksi oleh nilai agama, budaya dan politik. Pada umumnya perempuan melihat kesehatan reproduksi tidak bagian terpenting dalam kehidupannya, mereka menganggap bahwa sakit itu adalah demam, batuk, atau tyfus. Dapat dikatakan bahwa hak reproduksi perempuan masih kurang diperkenalkan pada masyarakat (Jurnal Perempuan No 53; 2007).

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB dan kehidupan seksual yang rendah, berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi belum menyentuh sebagian besar penduduk sehingga status kesehatan reproduksi perempuan relatif rendah. Menurut BKKBN hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Hal ini disebabkan oleh tidak memadai dan kurangnya informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- Perilaku seksual berisiko tinggi yang masih dijumpai di masyarakat
- Pelayanan kesehatan reproduksi yang kurang merata hampir di seluruh lapisan masyarakat
- Sikap-sikap yang merugikan perempuan, khususnya dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan gizi
- Kurang berdayanya perempuan dan anak perempuan dalam pengaturan kehidupan seksual dan reproduksi mereka serta akses ke pelayanan kesehatan □ Kesadaran terhadap hak-hak reproduksi masih kurang dominan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya perempuan mendapatkan informasi yang lengkap, benar dan akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Tidak terkecuali dengan perempuan pada masyarakat nelayan. Masyarakat

nelayan yang mayoritas hidup dalam lingkaran kemiskinan, dimana sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Subiyantoro persoalan kesehatan perempuan menjadi semakin kompleks, ketika perempuan berada dalam situasi miskin. Persoalan kesehatan perempuan tidak hanya menghadapi masalah ketidakmengertian mengenai pentingnya kesehatan reproduksi juga menghadapi persoalan akses terhadap kesehatan (dalam Jurnal Perempuan No 53; 2007)

Berdasarkan beberapa hasil studi dan penelitian (Kusnadi (2004), Fachrina (2009), Asmawi (1997) mengungkapkan bahwa perempuan nelayan, terutama istri nelayan mayoritas terlibat penuh dalam perekonomian rumah tangganya, disamping juga mengurus persoalan domestik. Tekanan kemiskinan dan beban pekerjaan relatif lebih dirasakan istri nelayan. Dengan jumlah anak rata-rata 4 sampai 6 atau 7 anak istri nelayan seakan tidak mempunyai waktu/kesempatan memperhatikan dan menjaga kesehatan apalagi mengenai kesehatan reproduksinya, bahkan jika hamil lagi mungkin pilihan aborsi ke dukun yang diinginkan suami. Ketika melahirkan dan menyusui, tidak ada jaminan bahwa mereka pada masa itu berhak mendapatkan gizi yang cukup. Persoalan juga muncul ketika harus memilih alat kontrasepsi, relatif jarang sekali perempuan yang menentukan alat kontrasepsi yang cocok dan sehat baginya. Kemudian juga dihadapkan pada kenyataan yaitu cenderungnya melakukan hubungan seksual di saat yang tidak aman dan nyaman, karena suami biasanya pergi melaut malam hari dan pulang pagi/siang hari, maka hubungan seksual lebih memungkinkan dilakukan di siang hari. Belum lagi ancaman tertular penyakit AIDS pun yang di depan mata bagi suami-suaminya yang buruh nelayan pada kapal besar yang mampir di pelabuhan, dan hanya pulang ke rumah 2 atau 3 kali sebulan. Dari sinilah muncul permasalahan dalam kesehatan reproduksinya. Keletihan dalam ruang privat ini dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan (Siregar: 2002).

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Masalah dipecahkan dengan menggunakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut

1. Memberikan pengetahuan kepada perempuan nelayan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi terutama mengenai elemen dan isu-isu kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual, HIV/AIDS.

2. Memberikan pemahaman kepada perempuan nelayan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak reproduksi perempuan antara lain hak untuk menentukan jumlah, jarak anak, hak atas kesehatan seksual, hak untuk mencapai standar kesehatan seksual dan reproduksi, hak untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan hak untuk membuat keputusan yang bebas diskriminasi, paksaan dan kekerasan.
3. Memberikan pendampingan dalam rangka memperbaiki perilaku perempuan dalam keluarga nelayan dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapinya berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi
4. Mendorong perempuan dalam keluarga nelayan menjadi perempuan yang berdaya dan bertanggungjawab atas kesehatan reproduksinya sendiri.

Berdasarkan kerangka pemecahan masalah seperti yang dijelaskan diatas maka metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui:

1. Pendidikan masyarakat berupa ceramah dan penyuluhan
Ceramah dan penyuluhan menggunakan cara belajar orang dewasa
2. Focus Group Discussion (FGD)
Metode Focus Group Discussion digunakan untuk;
 - a) Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi perempuan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perilaku-prilaku yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
 - b) Membuat komitmen untuk mewujudkan perilaku hidup sehat yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang. Lokasi ini dipilih karena daerah tersebut adalah tempat perkampungan nelayan Dimana sasaran kegiatan ini adalah perempuan dalam keluarga nelayan khususnya istri nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk kelancaran kegiatan.

Acara dilaksanakan dalam dua hari yaitu pada 7-8 November 2018. Peserta kegiatan ini terdiri dari perempuan dari keluarga nelayan khususnya istri nelayan yang bertempat tinggal di kelurahan tersebut. Kegiatan pengabdian mendapatkan respon yang positif dari peserta yang datang lebih awal dan semangat dalam berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar kepada narasumber menyangkut pengalaman sehari-hari berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka. Disamping itu dukungan fasilitas dan layanan juga diberikan oleh pihak kelurahan.

Pada sesi pertama, acara yang diawali dengan pembukaan oleh moderator dan kata sambutan dari Bapak Lurah, perkenalan tim pengabdian dan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber dari PKBI Sumbar antara lain mengenai pendekatan siklus hidup, kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja dan lansia, keluarga berencana, kematian ibu dan bayi (AKI), penyakit menular seksual dan pencegahan serta penanggulangannya serta keluhan-keluhan pada saat menopause. Berikutnya pada sesi merupakan sesi FGD (Focus Group Discussion) yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang terjadi pada peserta, yaitu perempuan istri nelayan. Pada kesempatan ini juga dilakukan proses pemberdayaan dan merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi peserta dalam rangka mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi istri nelayan terkait dengan kesehatan reproduksi dan meningkatkan kesadaran istri nelayan terhadap hak kesehatan seksualitas.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dimulai sejak perencanaan dan pengorganisasian kegiatan pengabdian, proses administratif pada Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang, sampai kepada tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan. Dari proses keseluruhan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengabdian diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

- a. Koordinasi Tim Pengabdian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan relatif baik. Hal ini ditandai dengan adanya komunikasi yang terbangun di dalam tim dari awal hingga akhir kegiatan pengabdian.
- b. Pengurusan lokasi pengabdian di Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang berjalan cukup baik dan lancar.

- c. Partisipasi peserta tinggi dan ikut berpartisipasi aktif dalam setiap sesi kegiatan yang dilakukan. Peserta memberikan masukan dan membangun kesadaran bersama mengenai kesehatan reproduksi.

Keberhasilan kegiatan pengabdian yang telah dikemukakan di atas tentunya didukung oleh banyak faktor. Di antara faktor pendukung itu adalah *pertama*, adanya dukungan moril dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak khususnya pihak yang diundang. *Kedua*, para peserta sangat senang dan aktif dalam mengikuti kegiatan. *Ketiga*, kegiatan didesain dengan model dan metode pendidikan orang dewasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan telah berjalan dengan baik dan lancar dengan dihadiri oleh istri nelayan di Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang yang menjadi sasaran. Telah terbangun kesadaran bersama mengenai hak reproduksi perempuan antara lain hak untuk menentukan jumlah, jarak anak, hak atas kesehatan seksual, hak untuk mencapai standar kesehatan seksual dan reproduksi, hak untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan hak untuk membuat keputusan yang bebas diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Dari hasil FGD maka, telah terbentuk komitmen bersama untuk menjadi perempuan yang berdaya dan bertanggungjawab atas kesehatan reproduksinya sendiri.

Saran

Kegiatan sejenis perlu dilakukan dalam skala yang lebih luas. Diharapkan nantinya ada menjadi perempuan yang memiliki pengetahuan, berdaya dan bertanggungjawab atas kesehatan reproduksinya sendiri. Disamping itu juga disarankan dapat dilaksanakan pemberdayaan terhadap laki-laki khususnya pihak suami mengingat rendahnya tingkat partisipasi suami dalam kesehatan reproduksi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana dkk. 1998. "*Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Baso, ZA dan Raharjo, J. 1999. "*Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan*", Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Fachrina, 2009. "*Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Keluarga Nelayan*", *Laporan Penelitian*, LPPM Unand.
- Kusnadi, dkk, 2004. "*Peran Publik Istri Nelayan Madura dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial Ekonomi Rumah Tangga*". Lembaga Penelitian. Jember.

- Mohamad, Kartono, 2007. "Kesehatan Reproduksi sebagai Hak". dalam *Jurnal Perempuan No.53 Th.2007*. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Sadli, Saparinah, 2007. "Meningkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Perubahan UndangUndang Kesehatan". dalam *Jurnal Perempuan No.53 Th.2007*. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Bahan pembelajaran Pengarusutamaan Gender: Panduan dan Bunga Rampai (BKKBN, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, UNFPA, cetakan ke-5, 2005.
- Sucipto, Helly P. dan Faturrochman. 1999. "*Pengetahuan, Sikap, dan Pratik Kesehatan Reproduksi Remaja*". Pusat Penelitian Kependudukan. Gajah Mada. Yogyakarta.